

FORKOPIMDA

Irjen Pol Ahmad Luthfi; Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Penegakan Hukum Tanpa Kesewenang-wenangan

Manayangs - BLORA.FORKOPIMDA.COM

Jun 18, 2024 - 16:49



Polda Jateng - Kota Surakarta | Penegakan hukum yang dilakukan anggota Polri harus dilakukan dengan adil tanpa kesewenang-wenangan. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan memenuhi asas Equality Before the Law.

Demikian penekanan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memberikan arahan kepada seluruh Kasat Lantas, Kasat Reskrim dan Kasat Resnarkoba jajaran Polda Jateng di Aula Lantai 3 Mapolresta Surakarta pada Selasa, (18/6/2024) pagi.

Dalam arahannya, Irjen Pol Ahmad Luthfi menyatakan bahwa seluruh Kasat Opsnal jajaran Polres harus menjauhi tindakan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Ditegaskan bahwa kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum tidak dapat ditoleransi.

"Setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku," tegas Kapolda.

Penegakan hukum harus memegang prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum, tanpa pengecualian.

"Tidak ada yang kebal hukum, semua orang sama di mata hukum. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh anggota polisi," kata Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat terkait penanganan perkara, Kapolda memberikan instruksi kepada para Kasat untuk membuka kembali tunggakan-tunggakan kasus. Kejelasan penanganan perkara dan penyelesaian terhadap kasus-kasus lama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam upaya mencari keadilan.

"Buka kembali tunggakan-tunggakan kasus yang ada. Masyarakat berhak atas keadilan, dan kita harus memastikan bahwa mereka mendapatkannya," ujar Kapolda dengan tegas.

Kapolda juga menyinggung pentingnya sinergi antar Criminal Justice System (CJS) dalam upaya memastikan penegakan hukum yang adil dan efisien. Kerja sama dan sinergi antar aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik.

"Sistem peradilan pidana harus berjalan dengan baik, mulai dari penangkapan, penyidikan, hingga persidangan. Semua harus bekerja sama untuk mencapai keadilan," jelas Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan masyarakat adalah representasi hadirnya negara di tengah masyarakat. Sebagai etalase Polri, setiap personil harus menampilkan kesiap-siagaan dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

"Apa pun yang kalian lakukan adalah representasi dari Polri. Bukan hanya soal mengatur lalu lintas, tetapi juga melayani dan melindungi masyarakat. Kesiapsiagaan kita harus selalu terjaga," tutur Kapolda.

Kapolda meminta agar para Kasat memastikan pelayanan publik harus bebas dari pungli dan calo. Dirinya menegaskan tidak ada tempat bagi praktik percaloan dan pungutan liar di jajaran Polda Jateng.

"Zona Integritas harus diterapkan. Para Kasat harus memastikan bahwa pelayanan publik bebas dari calo dan pungli. Sanggup?" tegasnya dijawab dengan kesanggupan seluruh Kasat yang hadir.

Dalam aspek penegakan hukum lalu lintas, Kapolda menekankan pentingnya pendekatan preemtif dan preventif. Penegakan hukum dilakukan jika menimbulkan akibat hukum seperti kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

"Penegakan hukum harus didahului dengan tindakan preemtif dan preventif. Penegakan hukum dilakukan jika ada pelanggaran serius yang berakibat fatal, seperti kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia," ujar Kapolda.

Terakhir, Kapolda ingin agar para Kasat berinovasi dengan memunculkan produk pelayanan yang memudahkan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk komitmen bahwa Polri selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Kita harus terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik," pungkas Irjen Pol Ahmad Luthfi.